

**PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
KECAMATAN KELAPA**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KELAPA  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

## KECAMATAN KELAPA

Jl.Raya Kelapa No. 71 Kode Pos 33364 Telp. (0715) 355100, 355101 Fax (0715) 355049

### KEPUTUSAN CAMAT KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR : 188.4/ 21.a /SK/19.04.04/2024

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT

Nomor : 188.4/26.c/SK/19.05.04/2023

#### TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) KECAMATAN KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024

#### CAMAT KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Camat Kelapa Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/26.c/SK/19.05.04/2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaannya menunjukan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan di tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kelapa Kabupaten Bangka Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Kelapa Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/26.c/SK/19.05.04/2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
  17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8);

20. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 26 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 106 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 13 Seri D);
21. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 50 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 105 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 62 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Camat Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/26.c/SK/19.05.04/2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Kelapa pada tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelapa  
Pada tanggal : 26 September 2024



**Hj. RESMAYANA**

## KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) ini merupakan tindaklanjut dari salah satu program Pemerintah yang berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Penyusunan Rencana Kerjadan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang transparan dan akuntabel yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, bersama ini kami sampaikan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024, yang merupakan upaya rencana kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2024.

Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa banyak hal yang perlu disempurnakan di dalam penyusunan ini dan untuk itu kami mengharapkan adanya masukan-masukan dan saran serta kritik yang bersifat positif untuk perbaikan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa ini.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Penyusunan .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI TRIWULAN II</b>	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s.d Triwulan II pada Tahun berkenaan.	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	48
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi PD.....	53
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD .....	56
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	67
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	67
3.3 Program dan Kegiatan .....	70
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1 Rencana Prioritas Pembangunan.....	74
4.2 Pendanaan Rencana Program Prioritas Pembangunan .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	84

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang memuat prioritas pembangunan Daerah, program, kegiatan/subkegiatan yang terukur dan berorientasi pada hasil serta pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah dan RKPD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Sesuai dengan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Renja OPD Kecamatan Kelapa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai pada penyusunan anggaran.

Renja OPD Kecamatan Kelapa tahun 2024 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat Kelapa Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.4/26.c/SK/19.05.04/2023.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, sesuai dengan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD Tahun 2024 dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya

perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi dan lainnya.

Perencanaan pembangunan diawali oleh penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yang memuat target-target indikator kinerja yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun. Dalam upaya untuk mencapai target-target indikator kinerja tersebut disusunlah program-program dan kegiatan-kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun. Dokumen tersebut diakomodir dan dituang kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat telah ditemui beberapa kondisi yang memerlukan tindaklanjut dan penanganan segera sehingga diperlukan perubahan perencanaan pembangunan Tahun 2024, seperti :

1. Pergeseran pagu kegiatan, recfusing anggaran, penghapusan kegiatan/penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka keuangan daerah yang berdampak terhadap kebijakan penganggaran yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan pagu anggaran kegiatan yang belum diakomodir kedalam APBD Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal di atas, untuk mengakomodir perubahan kondisi di Tahun 2024, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa.

Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi KUPA Tahun

2024, Perubahan PPAS APBD Tahun 2024, serta Perubahan APBD Tahun 2024, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

## **1.2. Dasar Penyusunan**

Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2024 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat

- Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
  22. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 26 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 106 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 13 Seri D);
  23. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 50 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 36 Seri E);
24. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 56 Seri E);
  25. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024;
  26. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024;
  27. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2024 adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas kondisi strategis daerah. Perubahan Renja OPD Tahun 2024 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kecamatan Kelapa khususnya dan Kabupaten Bangka Barat pada umumnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada tahapan

pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2024.

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yakni :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dalam 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024 dan perakiraan maju tahun 2025.
2. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi melihat sumber daya yang ada;
4. Diperolehnya perubahan atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bangka Barat tahun 2024;
5. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) OPD Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dan Perubahan PPAS APBD Tahun 2024 sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD OPD Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Renja OPD Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang penyusunan dokumen Perubahan Renja OPD yang menjelaskan pengertian ringkas dokumen Perubahan Renja OPD dan proses penyusunan dokumen Perubahan Renja OPD, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja OPD, maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja OPD serta sistematika penyusunan dokumen Perubahan Renja OPD.

##### **BABII EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dan capaian kinerja, identifikasi isu strategis OPD Kecamatan Kelapa.

### BAB III SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara singkat perumusan sasaran dan prioritas pembangunan OPD Kecamatan Kelapa berdasarkan telaah terhadap kebijakan nasional dan daerah.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagupendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

### BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kaedah-kaedah pelaksanaan dan operasionalisasi dari Perubahan Renja OPD Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

## BAB II

### EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, merupakan urusan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan/ permasalahan yang dihadapi

Rangkuman Realisasi Capaian Kinerja Target Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan :

a. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan tahun 2023, dari total 47 subkegiatan ada 3 subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil maupun target kinerja keluaran yakni :

1. Subkegiatan Penyediaan jasa surat-menyurat dengan capaian kinerja 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan.

2. Subkegiatan Evaluasi Kelurahan dengan capaian kinerja 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan.

3. Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 33,33% atau 2 unit dari target 6 unit.

b. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan tahun 2023, dari total 47 subkegiatan ada 44 Subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil maupun target kinerja keluaran.

- c. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan tahun 2023, tidak ada Program/kegiatan/ subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil maupun target kinerja keluaran.

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target program/kegiatan/subkegiatan.

Sebagaimana data yang tersaji sebelumnya, bahwa ada 3 subkegiatan yang tidak memenuhi target, adapun penyebab tidak tercapainya target-target tersebut antara lain :

1. Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat capaian kinerja 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan realisasi keuangan 0% atau sebesar Rp. 0,- dari anggaran 250.000,- hal ini disebabkan sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2023 baik fisik maupun keuangan tidak terealisasi dikarenakan penyampaian surat menyurat dilakukan melalui penyampaian langsung ke OPD terkait, aplikasi Srikandi serta Whatsapp web.
2. Evaluasi Kelurahan rencana Rp. 2.110.000,- realisasi Rp. 0,- selisih Rp. 2.110.000,- Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan, sedangkan realisasi keuangan sebesar 0% hal ini disebabkan karena pada tahun ini hasil penilaian lomba/evaluasi langsung ditetapkan oleh tim kabupaten sehingga evaluasi kelurahan tidak dilaksanakan lagi oleh kecamatan.
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan rencana Rp. 400.000.000,- realisasi Rp. 326.180.000,- selisih Rp. 73.820.000,- Capaian kinerja sebesar 33,33% atau 2 unit dari target 6 unit, sedangkan realisasi keuangan sebesar 81,5%. Dari selisih anggaran 73.820.000,- diantaranya bersumber dari dana DAU yakni sebesar 47.000.000 sedangkan sisanya bersumber dari APBD, kegiatan ini tidak terealisasi

dikarenakan keterlambatan informasi yang didapat oleh pihak kelurahan terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana DAU khususnya, pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan pada semester pertama namun karena kurangnya informasi terkait penyaluran dana kegiatan, sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi sampai akhir triwulan IV tahun 2023.

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Diharapkan hasil dari pelaksanaan program kegiatan dan aktivitas yang telah dilakukan membawa implikasi positif pada pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Kelapa.

- b. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan yang diambil untuk mempertahankan capaian kinerja adalah :

1. Peningkatan koordinasi antar pimpinan dalam Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa, dan pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal.
2. Peningkatan kualitas dengan kuantitas SDM sehingga mampu mengatasi perubahan kebijakan yang terjadi.
3. Penguatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program, kegiatan, Subkegiatan dan aktivitas kinerja.

Untuk lebih rinci laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel TC.29 dibawah ini :

Tabel TC. 29										
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023										
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Barat										
Nama Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Kelapa										
Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100		100	100	100	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	20	4	4	4	100.00	4	12	60.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	4	4	100.00	4	12	60.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	3	3	3	100.00	3	9	60.00

			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130	26	26	26	100.00	26	78	60.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10	2	2	2	100.00	2	6	60.00
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	2	2	2	100.00	2	6	60.00
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>							
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	3	3	3	100.00	3	9	60.00
			<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>							
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>							
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	12	1	1	100.00	1	14	23.33
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130		26	26	100.00	26	52	40.00

			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130		26	26	100.00	26	52	40.00
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	4	1	1	100.00	1	6	30.00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5		4	4	100.00	2	6	120.00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	2	1	1	100.00	1	4	40.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	12	1	1	100.00	1	14	23.33
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	12	1	1	100.00	1	14	23.33
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60	12	1	1	100.00	1	14	23.33
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	1	1	100.00	1	14	23.33
			Pentatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	12	1	1	100.00	1	14	23.33
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60.00</b>
			Penyediaan jasa surat-menyerat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyerat	5		1		0.00	1	1	20.00
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	1	1	100.00	1	14	23.33

			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12	1	1	100.00	1	14	23.33
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100.00</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>60.00</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	12	15	15	100.00	13	40	307.69
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7		4	4	100.00	5	9	128.57
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9	1	8	8	100.00	8	17	188.89
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4		1	1	100.00	1	2	50.00
			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
			Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	1	1	1	100.00	1	100	10,000.00

			Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100.00</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100.00</b>
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	5		1	1	100.00	1	2	40.00
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang di Limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Percentase Usulan Kelurahan yang Terakomodir Pada Saat Musrenbang Kecamatan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	5					5	100.00
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35	3					3	8.57
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas, Ormas dan Lembaga yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	6					6	100.00
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5	1	1	0	0.00	1	2	40.00
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100.00</b>

			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	2					2	66.67
			<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.</b>	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
			<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	550	110	110	110	100.00	110	330	60.00
			Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan</b>	7	7	7	7	100.00	7	7	100.00
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500	100	100	100	100.00	100	300	60.00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00

			<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00
			<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	650	130	130	130	100.00	130	390	60.00
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	1				1	2	40.00
			<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN KELAPA</b>									
			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah</b>								
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
			Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20		1	1	100.00	1	2	10.00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5		1	1	100.00		1	20.00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10		1	1	100.00	1	2	20.00

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60		1	1	100.00	1	2	3.33
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60		1	1	100.00	1	2	3.33
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5		1	1	100.00	1	2	40.00
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60		1	1	100.00	1	2	3.33
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60		1	1	100.00	1	2	3.33
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	60		1	1	100.00	1	2	3.33
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60		1	1	100.00	1	2	3.33
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5		1	1	100.00	1	2	40.00
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5		1	1	100.00	1	2	40.00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5		1	1	100.00	1	2	40.00
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat</b>								
			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Usulan Kelurahan yang Terakomodir Pada Saat Musrenbang Kecamatan</b>	100	100	100	100	100.00	100	100	100.00

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5		5	5	100.00	5	5	100.00
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35		6	2	33.33	1	3	8.57
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas, Ormas dan Lembaga yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6		3	3	100.00	3	6	100.00

## **Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Triwulan II Tahun 2024)**

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa pada tahun 2024 melaksanakan 6 Program yang terdiri dari 16 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Total Anggaran yang dituangkan dalam DPA SKPD Tahun 2024 sebesar Rp5.667.610.000,- dengan realisasi Rp2.508.124.926,- (1 januari-30 Juni) atau rata-rata tercapai 25,61%.

Adapun uraian program, kegiatan dan Sub Kegiatan beserta anggaran dan realisasi tersebut terlihat dalam hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 berikut ini :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Anggaran Rp4.164.010.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.857.612.776,00 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 13,40% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 20,91%.

#### **a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp600.000,00 atau rata-rata capaian keuangan sebesar 40% dari anggaran Rp1.500.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 51%.

##### **1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja sebesar 25% atau 1 dokumen dari target 4 dokumen atas indikator jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp300.000,00 atau 0%.

##### **2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 dokumen dari target 1 dokumen atas indikator jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp300.000,00 atau 0%.

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 dokumen dari target 1 dokumen atas indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp300.000,00 atau 0%.

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Capaian kinerja sebesar 50% atau 2 laporan dari target 4 laporan atas indikator jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp300.000,00 dari anggaran sebesar Rp300.000,00 atau 100%.

5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja sebesar 100% atau 3 laporan dari target 3 laporan atas indikator jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp300.000,00 dari anggaran sebesar Rp300.000,00 atau 100%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp1.528.158.765,00 atau rata-rata capaian keuangan 37,15% dari anggaran Rp3.145.450.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 25,00%.

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 orang/bulan dari target 26 orang/bulan atas indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp

Rp1.527.858.765,00 dari anggaran sebesar Rp3.144.550.000,00 atau 48,59%.

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Capaian kinerja sebesar 100% atau 1 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp300.000,00 dari anggaran sebesar Rp300.000,00 atau 100%.

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 2 laporan atas indikator jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp300.000,00 atau 0%.

- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 dokumen dari target 2 dokumen atas indikator jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp300.000,00 atau 0%.

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini sampai dengan triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp0,00 atau rata-rata capaian keuangan 0% dari anggaran Rp300.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 0%.

- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 3 laporan atas indikator jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp300.000,00 atau 0%.

d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp0,00 atau rata-rata capaian keuangan 0% dari anggaran Rp300.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 0 %.

1) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 dokumen dari target 1 dokumen atas indikator jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp 300,000,00 atau 0%.

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp300.000,00 atau rata-rata capaian keuangan 33,33% dari anggaran Rp900.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 0%.

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 dokumen dari target 1 dokumen atas indikator jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp300.000,00 dari anggaran Rp300.000,00 atau 100%.

2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 orang dari target 26 orang atas indikator jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp300.000,00 atau 0%.

3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 orang dari target 26 orang atas indikator jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp300.000,00 atau 0%.

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp64.097.570,00 atau rata-rata capaian keuangan 29,80% dari anggaran sebesar Rp298.800.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 22,22%.

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 paket dari target 1 paket atas indikator jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp965.000,00 dari anggaran Rp2.000.000,00 atau 48,25%.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian kinerja sebesar 100% atau 2 paket dari target 2 paket atas indikator jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp20.000.000,00 atau 0%.

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 paket dari target 1 paket atas indikator jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp1.242.000,00 dari anggaran sebesar Rp6.000.000,00 atau 20,70%.

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 paket dari target 1 paket atas indikator jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp3.045.000,00 dari anggaran Rp75.000.000,00 atau 4,06%.

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 paket dari target 1 paket atas indikator jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp3.876.300,00 dari anggaran Rp22.500.000,00 atau 17,23%.

6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 dokumen dari target 1 dokumen atas indikator jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp600.000,00 dari anggaran Rp3.000.000,00 atau 20,00%.

7) Penyediaan Bahan/Material

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 paket dari target 1 paket atas indikator jumlah paket bahan/material yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp11.650.000,00 dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00 atau 19,42%.

8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp42.419.270,00 dari anggaran sebesar Rp 110.000.000,00 atau 38,60%.

9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 dokumen dari target 1 dokumen atas indikator jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp300.000,00 dari anggaran sebesar Rp300,000,00 atau 100%.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp262.956.441,00 atau rata-rata capaian keuangan sebesar 19,34% dari anggaran Rp643.880.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 0%.

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 0,00 dari anggaran sebesar Rp 250.000,00 atau 0%.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp11.006.441,00 dari anggaran sebesar Rp62.400.000,00 atau 17,60%.

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp800.000,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 atau 16,00%.

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan penyediaan jasa

pelayanan umum kantor yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp251.150.000,00 dari anggaran sebesar Rp574.480.000,00 atau 43,70%.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp1.500.000,00 atau rata-rata capaian keuangan sebesar 7,68% dari anggaran Rp72.880.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 25,00%.

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 unit dari target 14 unit atas indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp 35.000.000,00 atau 0%.

2) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 unit dari target 5 unit atas indikator jumlah gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp 28.000.000,00 atau 0%.

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 unit dari target 8 unit atas indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp1.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.880.000,00 atau 24.59%.

- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian kinerja sebesar 100% atau 1 unit dari target 1 unit atas indikator jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 atau 0%.

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Anggaran Rp479.315.000,00 dan terealisasi sebesar Rp203.701.000,00 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 47,27% dan rata-rata capaian kinerja 50,00%.

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp8.075.000,00 atau rata-rata capaian keuangan sebesar 100% dari anggaran Rp8.075.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 100%.

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Capaian kinerja sebesar 100% atau 1 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp8.075.000,00 dari anggaran sebesar Rp8.075.000,00 atau 100%.

- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp195.626.000,00 atau rata-rata capaian keuangan

sebesar 41,81% dari anggaran Rp467.940.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 0%.

1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp195.626.000,00 dari anggaran sebesar Rp467.940.000,00 atau 41,81%.

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp0,00 atau rata-rata capaian keuangan sebesar 0% dari anggaran Rp 3.300.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 50%.

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan atas indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp300.000,00 atau 0%.

2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Capaian kinerja sebesar 100% atau 1 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00 atau 0%.

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Anggaran Rp18.935.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.200.000,00 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 36,26% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 67,50%.

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp12.200.000,00 atau rata-rata capaian keuangan sebesar 72,51% dari anggaran Rp 16.825.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 50,00%.

1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Capaian kinerja sebesar 50,00% atau 1 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp12.200.000,00 dari anggaran sebesar Rp16.825.000,00 atau 72,51%.

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp 0,00 atau rata-rata capaian keuangan sebesar 0% dari anggaran Rp2.110.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 85%.

1) Evaluasi Kelurahan

Capaian kinerja sebesar 85% atau 1 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp2.110.000,00 atau 0%.

#### **4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Anggaran Rp3.825.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 0% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 0%.

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp0,00 atau rata-rata capaian keuangan sebesar 0% dari anggaran Rp3.825.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 0%.

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp300.000,00 atau 0%.

- 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp3.525.000,00 atau 0%.

## **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Anggaran Rp49.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 0% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 0%.

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp0,00 atau rata-rata capaian keuangan sebesar 0% dari anggaran Rp49.000.000,00 untuk capaian kinerja sebesar 0%.

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 orang dari target 100 orang atas indikator jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp40.000.000,00 atau 0%.

2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 dokumen dari target 1 dokumen atas indikator jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan dikecamatan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran Rp9.000.000,00 atau 0%.

## 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Anggaran Rp18.635.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.050.000,00 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 25,00% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 50,00%.

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Daerah

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp1.050.000,00 atau rata-rata capaian keuangan sebesar 25,00% dari anggaran Rp18.635.000,00 untuk capaian kinerja sebesar 50,00%.

1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 dokumen dari target 1 dokumen atas indikator jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan

triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp7.935.000,00 atau 0%.

2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Capaian kinerja sebesar 100% atau 1 dokumen dari target 1 dokumen atas indikator jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp2.650.000,00 atau 0%.

3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Capaian kinerja sebesar 100% atau 1 dokumen dari target 1 dokumen atas indikator jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp1.050.000,00 atau 0%.

4) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 dokumen dari target 1 dokumen atas indikator jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp7.000.000,00 atau 0%.

### **Sub Unit Organisasi : Kelurahan Kelapa**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Anggaran Rp116.610.000,00 dan terealisasi sebesar Rp44.375.150,00 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 22,37% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 11,11%.

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp37.093.450,00 atau rata-rata capaian keuangan

sebesar 42,67% dari anggaran Rp93.000.000,00 untuk rata-rata capaian kinerja sebesar 0%.

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 paket dari target 1 paket atas indikator jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp500.000,00 dari anggaran Rp1.000.000,00 atau 50,00%.

2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 paket dari target 1 paket atas indikator jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp1.379.000,00 dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00 atau 45,97%.

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 paket dari target 1 paket atas indikator jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp8.920.000,00 dari anggaran Rp22.500.000,00 atau 39,64%

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 paket dari target 1 paket atas indikator jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp11.246.950,00 dari anggaran Rp22.500.000,00 atau 50,00%.

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 dokumen dari target 1 dokumen atas indikator jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan,

sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp600.000,00 dari anggaran Rp1.500.000,00 atau 40,00%.

6) Penyediaan Bahan/Material

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 paket dari target 1 paket atas indikator jumlah paket bahan/material yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp11.250.000,00 dari anggaran sebesar Rp22.500.000,00 atau 50,00%.

7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp4.612.500,00 dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00 atau 23,10%.

b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp5.866.700,00 atau rata-rata capaian keuangan sebesar 24,44% dari anggaran Rp15.000.000,00 untuk capaian kinerja sebesar 0%.

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp5.866.700,00 dari anggaran sebesar Rp12.000.000,00 atau 48,90%

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 laporan dari target 1 laporan atas indikator jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II

adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00 atau 0%.

c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp0,00 atau rata-rata capaian keuangan sebesar 0% dari anggaran Rp8.610.000,00 untuk capaian kinerja sebesar 0%.

1) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 unit dari target 1 unit atas indikator jumlah gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 atau 0%.

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 unit dari target 1 unit atas indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp610.000,00 atau 0%.

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 unit dari target 1 unit atas indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00 atau 0%.

## **2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Anggaran Rp817.280.000,00 dan terealisasi sebesar Rp389.186.000,00 dengan rata-rata capaian keuangan sebesar 53,09% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 33,33%.

### **a. Pemberdayaan Kelurahan**

Kegiatan ini sampai dengan Triwulan II menyerap anggaran sebesar Rp389.186.000,00 atau rata-rata capaian keuangan sebesar 53,09% dari anggaran Rp817.280.000,00 untuk capaian kinerja sebesar 33,33%.

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Capaian kinerja sebesar 100% atau 5 Lembaga Kemasyarakatan dari target 5 Lembaga Kemasyarakatan atas indikator jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp2.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00 atau 100%.
- 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 unit dari target 1 unit atas indikator jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp4.830.000,00 dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00 atau 3.90%.
- 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Capaian kinerja sebesar 0% atau 0 Pokmas/ ormas/lembaga dari target 3 Pokmas/ ormas/lembaga atas indikator jumlah pokmas, ormas dan lembaga yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, sedangkan realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp382.356.000,00 dari anggaran sebesar Rp690.280.000,00 atau 55,40%.

**Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja serta Kendala yang Dihadapi sesuai dengan Kondisi yang terjadi :**

**A. Faktor Tantangan**

1. Penyusunan dan pemanfaatan produk-produk perencanaan belum optimal;
2. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam;
3. Meningkatnya kebutuhan data dan informasi yang harus digunakan dalam penyusunan produk perencanaan;
4. Ketersediaan sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan menyebabkan penempatan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan.

**B. Faktor Peluang**

1. Adanya alokasi anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan di tingkat kecamatan;
2. Adanya kewenangan urusan yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan cukup tinggi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan untuk menjaga konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.

### C. Kendala

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa tahun 2024 merupakan gambaran rencana pembangunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan, secara umum sampai dengan triwulan II Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024 OPD Kecamatan Kelapa yaitu rata-rata realisasi keuangan sebesar 25,61% sedangkan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 28,17%. Adapun penyebab realisasi keuangan dan fisik sangat rendah antara lain:

1. ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai anggaran kas yang tersedia seperti :
  - a. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Kegiatan ini semula direncanakan pada bulan Mei namun dikarenakan anggaran yang bersumber dari dana DAU baru masuk kas daerah pada bulan Juni dan terdapat beberapa kendala teknis lainnya, sehingga kegiatan ini belum dapat dilaksanakan tepat waktu atau persentase fisik kegiatan mencapai sebesar 3,9%.
  - b. Kegiatan Evaluasi Kelurahan sesuai dengan tahapannya hanya bisa dilaksanakan sekitar 85% kegiatan tersebut tidak bisa diselesaikan sampai tahapan akhir, dikarenakan kelurahan tidak ikut dalam penilaian lomba desa/kelurahan Tingkat Kabupaten karena ada beberapa indikator yang tidak dipenuhi yakni tidak melakukan pembaruan pada data Epdeskel Kelurahan sehingga kegiatan Evaluasi Kelurahan tidak dapat dilanjutkan sampai ke tingkat Kabupaten.
  - c. Serta beberapa belanja kegiatan rutin yang belum dilaksanakan sesuai anggaran kas yang telah disusun mengakibatkan deviasi sampai dengan bulan Juni.
2. Penginputan NPD baru dilaksanakan pada minggu ke empat sedangkan aplikasi SIPD mengalami buka tutup pada bagian penatausahaan keuangan pada minggu tersebut, karena ada

proses penginputan Mendahului Perubahan ke tiga (MP3) Tahun 2024

Untuk lebih rinci laporan hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah OPD Kecamatan Kelapa tahun 2024 s.d triwulan II dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2024  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
TRIWULAN II**







			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	659,433,800	3	Pokmas/ Ormas	690,280,000.00	26,075,000.00	355,621,000.00			-	381,896,000.00	0.00	55.3	3	1,041,329,800	target tidak diisi	target tidak diisi	Kelurahan Tanjung	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																							
																	Predikat kinerja	SR	R			#DIV/0!	#DIV/0!
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM		-	988,368,800		817,280,000.00	28,075,000.00	360,651,000.00		-	-	388,726,000.00									1,377,094,800.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																							
																	Predikat kinerja Program	SR	R			#DIV/0!	#DIV/0!
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KECAMATAN KELAPA		31,187,500,000.00	10,369,813,305.53		5,667,610,000.00	968,592,372.00	1,537,657,554.00		-	-	2,506,249,926.00									12,876,063,231.53			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM KECAMATAN KELAPA (%)																							
																	PREDIKAT KINERJA KECAMATAN KELAPA	SR	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KECAMATAN KELAPA		31,187,500,000.00	10,369,813,305.53		5,667,610,000.00	968,592,372.00	1,537,657,554.00		-	-	2,506,249,926.00									12,876,063,231.53			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM KECAMATAN KELAPA																							
																	PREDIKAT KINERJA KECAMATAN KELAPA	SR	SR			SR	SR

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sampai dengan tahun 2024, Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat bisa melaksanakan pelayanan dengan optimal dan akan terus ditingkatkan pada tahun mendatang. Pencapaian kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat secara ringkas pada tabel T-C.30 dibawah ini:

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Barat**

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
				2022 (thn n-1)	2023 (tnn n)	2024 (tnn n+1)	2025 (tnn n+1)	2026 (tnn n+1)	2022 (thn n-1)	2023 (tnn n-1)	2024 (tnn n)	2025 (tnn n)	2026 (tnn n)	2023 (thn n)	2024 (thn n+1)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13					13	14	15
1	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target			100%	100%	100%	100%	100%	96.88%	100%							
2	Persentase penanganan kasus ketenaman dan ketertiban umum oleh pihak secara bersinergi			40%	45%	50%	55%	60%	250%	222,22%							
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan yang memiliki standar pelayanan dan standar operasional prosedur			50%	60%	75%	90%	100%	189%	150%							
4	Persentase Anggaran kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan			20%	21%	21%	21%	21%	100%	19,62%							
5	Persentase Pemerintahan Desa dan kelurahan tertib administrasi			80%	90%	100%	100%	100%	72.50%	100%							

Berdasarkan Renstra OPD Kecamatan Kelapa Tahun 2021-2026, Kecamatan Kelapa memiliki 5 sasaran strategis yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pelayanannya. Adapun ke- 6 sasaran tersebut diukur berdasarkan indikator-indikator tertentu sebagai bentuk pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa.

- a. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator **“Percentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target”** diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Program Kecamatan}}{\text{Jumlah Total Seluruh Program Kecamatan}} \times 100\%$$

pada tahun 2023 rata-rata capaian kinerja program kecamatan sebesar 100 persen dari target 100 persen hal ini mengindikasikan bahwa indikator “percentase capaian kinerja perangkat daerah sesuai target” tercapai. Hal ini menunjukan adanya peningkatan capaian kinerja program pada tahun 2023 yakni 0,52 persen sedangkan di tahun 2022 capaian seluruh program sebesar 99,48 persen.

- b. Menurunnya kasus ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dengan Indikator **“Percentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban umum oleh pihak secara bersinergi”** diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Kasus yang ditangani oleh pihak secara bersinergi}}{\text{Jumlah kasus yang terjadi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 di wilayah Kecamatan Kelapa yang terdiri dari 13 desa dan 1 kelurahan, berdasarkan laporan keamanan dan ketertiban umum yang dikoordinir oleh bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada OPD Kecamatan Kelapa terdapat 4 kasus ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi yakni di Desa Tugang ada 2 kasus, Desa Terentang 1 kasus dan Kelurahan Kelapa 1 kasus. Dari 4 (empat) kasus yang terjadi semua dapat ditangani pihak kecamatan sesuai kewenangan kecamatan yang bersinergi dengan kepolisian dan aparat pemerintah desa setempat.

Hal ini menunjukan bahwa “Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban umum oleh pihak secara bersinergi” tercapai 100% persen dari target 45 persen atau tercapai sebesar 222,22% persen (hasil koordinasi dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum)

- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan Indikator **“Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan yang memiliki standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur”** diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah produk layanan yang memiliki SOP dan SP}}{\text{Jumlah total produk layanan yang seharusnya ber-SOP}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 produk layanan yang memiliki SOP adalah 8 produk dari 10 produk atau 80 persen sedangkan produk layanan yang memiliki SP adalah 6 produk dari 6 produk atau 100 persen sedangkan capaian rata-rata adalah 90 persen. Hal ini menunjukan bahwa indikator “Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan yang memiliki standar pelayanan dan standar operasional prosedur” tercapai 150 persen dari target 60 persen (hasil koordinasi dengan Seksi Pelayanan Umum).

- d. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan Indikator **“Persentase Anggaran kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan”** diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Anggaran Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan}}{\text{Total Anggaran Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

pada tahun 2023 alokasi untuk dana Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang bersumber dari APBD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa rata-rata sudah mencapai 19,62% dari target 21% atau tercapai sebesar 93,43% hal ini menunjukan target tidak tercapai pada tahun 2023 dan terjadi penurunan bila dibandingkan pada tahun 2022 yakni target tercapai 100%. Adapun hal yang menyebabkan tidak tercapainya target pada tahun 2023 adalah

terjadinya pengurangan anggaran bagi setiap OPD dikarenakan defisit anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

- e. Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelurahan dengan Indikator **“Percentase Pemerintahan Desa dan kelurahan tertib administrasi”** diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Desa yang mengirim laporan tepat waktu}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$$

pada tahun 2023 rata-rata desa yang menyampaikan laporan sesuai batas waktu yang ditentukan adalah sebesar 100 persen dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa Kayu Arang 5 laporan dari 5 laporan atau 100%
2. Desa Mancung 5 laporan dari 5 laporan atau 100%
3. Desa Sinar Sari 5 laporan dari 5 laporan atau 100%
4. Desa Beruas 5 laporan dari 5 laporan atau 100%
5. Desa Pusuk 5 laporan dari 5 laporan atau 100%
6. Desa Tuik 5 laporan dari 5 laporan atau 100%
7. Desa Tebing 5 laporan dari 5 laporan atau 100%
8. Desa Air Bulin 5 laporan dari 5 laporan atau 100%
9. Desa Dendang 5 laporan dari 5 laporan atau 100%
10. Desa Kacung 5 laporan dari 5 laporan atau 100%
11. Desa Terentang 5 laporan dari 5 laporan atau 100%
12. Desa Tugang 5 laporan dari 5 laporan atau 100%
13. Desa Pangkal Beras 5 laporan dari 5 laporan atau 100%

hal ini menunjukan bahwa indikator “Percentase Pemerintahan Desa dan kelurahan tertib administrasi” tercapai 100 persen (hasil koordinasi dengan Seksi Pemberdayaan Pemerintahan Desa). Dari analisa diatas, pemerintah desa di wilayah Kecamatan Kelapa sudah mulai tertib administrasi terlihat dari penyampaian laporan yang tepat waktu bila dibandingkan pada tahun 2022.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sejalan dengan laju pembangunan dan tuntutan kebutuhan telah memberikan dampak yang luas dan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan tugas Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa. Terdapat beberapa hal yang kemudian dianggap sebagai isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa.

Beberapa isu tersebut yang diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2024, yaitu:

1. Peningkatan peran Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 yang memuat fungsi kecamatan sebagai fasilitator dan koordinator pemerintah desa.
2. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Penguatan tata kelola pemerintah kecamatan yang baik, professional dan akuntabel.
4. Penyiapan SDM Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa yang berkualitas dan mumpuni dibidangnya dalam mempersiapkan pelaksanaan birokrasi pemerintah yang lebih handal di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa sesuai dengan beban tugas dan fungsi yang akan diemban berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 106 Tahun 2017.

Sedangkan beberapa permasalahan yang menjadi hambatan sekaligus tantangan (*Threats*) dalam pengembangan pelayanan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa adalah :

1. Sarana dan Prasarana (Sapras)
  - a. Pengadaan Barang Belanja Modal : Pemenuhan dan Perlengkapan Kantor berupa Gedung Kantor, Meja/Kursi kerja, Printer, Laptop, PC, meubeler, dll yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa belum sesuai standarisasi sarana prasarana kantor sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
  - b. Tempat pembuangan sampah yang melebihi kapasitas sehingga terjadi penumpukan sampah, perlu perluasan areal tempat pembungan sampah.
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
  - a. Ketersediaan sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan (masih ada pegawai yang belum menguasai teknologi informasi) menyebabkan penempatan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan;
  - b. Pola pengembangan karir pegawai belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Peningkatan karir aparatur dalam pemenuhan kompetensi teknis belum terpenuhi secara maksimal yang terdeskripsi pada Analisis Kebutuhan Diklat, sehingga perlu penyesuaian diklat-diklat teknis sesuai kebutuhan.
3. Timbulnya Permasalahan tanah yang ada di desa/kelurahan di Kecamatan Kelapa : belum didaftarkannya tanah oleh masyarakat di desa, double klaim kepemilikan penguasaan tanah didalam status kawasan hutan.
4. Fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa belum optimal
5. Laporan Keuangan dan Kegiatan (Laporan ADD, Laporan DD,LKPD,LPPD, Penyusunan APBDesa dll) belum tepat waktu,

hal ini disebabkan oleh lemahnya pengetahuan perangkat desa dalam pelaksanaan pelaporan.

6. Masih banyaknya kasus ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi.
7. Pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengawasan pada internal pemerintah kecamatan (Supervisi dan evaluasi);
8. Pemberian terhadap rekomendasi perizinan kurang memenuhi persyaratan teknis, disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang membangun terlebih dahulu baru kemudian mengajukan surat rekomendasi perizinan.
9. Belum optimalnya sistem pelayanan publik.
10. Masih rendah kesadaran masyarakat membayar retribusi persampahan.
11. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah.
12. Belum optimalnya data-data kondisi ekonomi sosial dan budaya yang menjadi bahan analisis dalam perumusan perencanaan di tingkat kecamatan.

Hal ini berdampak kurang baik bagi visi Kepala Daerah yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Bangka Barat yang Maju Sejahtera dan Bermartabat”** dan misi Kepala Daerah :

1. **Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;**
2. **Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia;**
3. **Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik.**

Sedangkan (*opportunity*) peluang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa dalam meningkatkan pelayanan antara lain:

1. Adanya alokasi anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan di tingkat kecamatan;
2. Adanya kewenangan urusan yang diserahkan pemerintah kabupaten ke kecamatan;
3. Meningkatkan secara optimal pemberian pelayanan kepada masyarakat;
4. Tertib dan tepat waktunya penyampaian laporan pemerintah desa;
5. Adanya beberapa obyek potensi retribusi yang menjadi kewenangan kecamatan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan**

Review terhadap rancangan RKPD Perubahan penting untuk dilakukan dalam rangka mendapatkan kebutuhan dana dan indikator kinerja riil dari program dan kegiatan/subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan. Review tersebut dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan secara ringkas dapat dilihat pada tabel T-C 31 dibawah ini :

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Barat**

**Nama Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Kelapa**

No	Ranwal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Kecamatan Kelapa</b>											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	4,164,010,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	4,102,960,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	1,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	1,500,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kelapa	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	300,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kelapa	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	300,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	300,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	300,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	300,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	300,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	300,000.00	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	300,000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	300,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	300,000.00	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			100%	<b>3,145,450,000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			100%	<b>3,145,450,000</b>	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kelapa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	3,144,550,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kelapa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	3,144,550,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	300,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	300,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 laporan	300,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 laporan	300,000.00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	300,000.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	300,000.00	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>300,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>300,000</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	300,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	300,000.00	
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>300,000</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>300,000</b>	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kecamatan Kelapa	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 dokumen	300,000.00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kecamatan Kelapa	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 dokumen	300,000.00	
	<b>Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>900,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>900,000</b>	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian	1 dokumen	300,000.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiian	1 dokumen	300,000.00	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 orang	300,000.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26 orang	300,000.00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 orang	300,000.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26 orang	300,000.00	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>298,800,000</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>286,550,000</b>	
	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,000,000.00	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 paket	2,000,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	20,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	20,000,000.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	6,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5,500,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	75,000,000.00	Tersedianya bahan logistik kantor	Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	70,000,000.00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	22,500,000.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	21,500,000.00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3,000,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2,250,000.00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	60,000,000.00	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	55,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	110,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	110,000,000.00	

	Pentatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	300,000.00	Pentatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	300,000.00	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>643,880,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>624,480,000</b>	
	Penyediaan jasa surat-menyerat	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyerat	1 laporan	2,000,000.00	Penyediaan jasa surat-menyerat	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyerat	0 laporan	-	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	62,400,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	45,000,000.00	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	5,000,000.00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	5,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	574,480,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	574,480,000.00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>72,880,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>43,480,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	35,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	5,600,000.00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kelapa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	5 Unit	28,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kelapa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	28,000,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kelapa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4,880,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kelapa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4,880,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kelapa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kelapa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000.00	
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			<b>100%</b>	<b>479,315,000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			<b>100%</b>	<b>479,315,000</b>	
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>100 Orang</b>	<b>8,075,000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>100 Orang</b>	<b>8,075,000</b>	
	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	1 laporan	8,075,000.00	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	1 laporan	8,075,000.00	
	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>			<b>1 Urusan</b>	<b>467,940,000</b>	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di</b>			<b>1 Urusan</b>	<b>467,940,000</b>	
	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	467,940,000	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	1 laporan	467,940,000	

	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>8 Urusan</b>	<b>3,300,000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>			<b>8 Urusan</b>	<b>3,300,000</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	300,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang di Limpahkan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	300,000.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang di Limpahkan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	3,000,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang di Limpahkan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	3,000,000.00	
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Kelapa		<b>100%</b>	<b>18,935,000</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Kelapa		<b>100%</b>	<b>18,935,000</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>100 Orang</b>	<b>16,825,000</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			<b>100 Orang</b>	<b>16,825,000</b>	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	16,825,000.00	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	1 laporan	16,825,000.00	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>100%</b>	<b>2,110,000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>100%</b>	<b>2,110,000</b>	
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	2,110,000.00	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	2,110,000.00	
<b>4</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>100%</b>	<b>3,825,000</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>100%</b>	<b>2,825,000</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>110 Orang</b>	<b>3,825,000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>110 Orang</b>	<b>2,825,000</b>	

	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1 laporan	300,000.00	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1 laporan	300,000.00	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	3,525,000.00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	2,525,000.00	
5	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum</b>			<b>100%</b>	<b>49,000,000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum</b>			<b>100%</b>	<b>47,000,000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>7 Urusan</b>	<b>49,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>7 Urusan</b>	<b>47,000,000</b>	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Kelapa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	100 orang	40,000,000.00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Kelapa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	100 orang	40,000,000.00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	9,000,000.00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	7,000,000.00	
6	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>100%</b>	<b>18,635,000</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>100%</b>	<b>11,635,000</b>	

	<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>130 Orang</b>	<b>18,635,000</b>	<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>130 Orang</b>	<b>11,635,000</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	7,935,000.00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	7,935,000.00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	2,650,000.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	1 dokumen	2,650,000.00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	1,050,000.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	1,050,000.00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	7,000,000.00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 dokumen	-	
<b>SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN KELAPA</b>					<b>933,890,000</b>					<b>929,890,000</b>	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>100%</b>	<b>116,610,000</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>112,610,000</b>	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>93,000,000</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>90,000,000</b>	
	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1,000,000.00	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1,000,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3,000,000.00	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	22,500,000.00	Penyediaan bahan logistik kantor	Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	21,500,000.00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	22,500,000.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	21,500,000.00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Kelapa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1,500,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Kelapa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1,500,000.00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	22,500,000.00	Penyediaan Bahan/Material	Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	21,500,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kelapa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	20,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kelapa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	20,000,000.00	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>15,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>15,000,000</b>	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik	Kelurahan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	12,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik	Kelurahan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	12,000,000.00	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	3,000,000.00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	3,000,000.00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>8,610,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>100%</b>	<b>7,610,000</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Kelapa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Kelapa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	4,500,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Kelapa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	610,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Kelapa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	610,000.00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Kelapa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	3,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Kelapa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	2,500,000.00	
<b>2</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			<b>100%</b>	<b>817,280,000</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			<b>100%</b>	<b>817,280,000</b>	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>100%</b>	<b>817,280,000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>100%</b>	<b>817,280,000</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kelapa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga kemasyarakatan	2,000,000.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kelapa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga kemasyarakatan	2,000,000.00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kelapa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	125,000,000.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kelapa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	178,725,000.00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kelapa	Jumlah Pokmas, Ormas dan Lembaga yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/ ormas	690,280,000.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kelapa	Jumlah Pokmas, Ormas dan Lembaga yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/ ormas	636,555,000.00	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran anggaran, perubahan target indikator pada pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu prioritas utama dalam rangka percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Sehingga di era otonomi daerah sekarang ini pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur sehingga diharapkan akan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya:

**Tabel 3.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026**

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
		2. Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah
	2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	3. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhhlak Mulia	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Menurunnya Angka Kemiskinan
		2. Menurunnya Angka Pengangguran
		1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		4. Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat
	2. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
		2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah
		1. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, Tema Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Perekonomian Berbasis Keunggulan Daerah dan**

## **Menghilangkan Kemiskinan Ekstrim yang Didukung Reformasi Tata Kelola Pemerintahan”.**

Tema yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan dengan memperhatikan sasaran pembangunan tahun 2024 dan permasalahan serta isu strategis pada saat penyusunan RKPD Tahun 2024.

Adapun prioritas pembangunan pada perubahan RKPD Tahun 2024 adalah :

1. Optimalisasi Pelayanan Dasar;
2. Optimalisasi Penanganan *Stunting*;
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;

Melihat dari keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, Selanjutnya tujuan dan sasaran strategis OPD Kecamatan Kelapa dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya:

**Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah OPD Kecamatan Kelapa Tahun 2021-2026**

NO (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (4)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA						
				2020 (5)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	2025 (9)	2026
1.	<i>Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah</i>		<i>Nilai SAKIP OPD</i>	68.30	64.90	68.80	69.30	69.80	70.30	70.80
		Sasaran 1. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	<i>Tujuan 2. Mewujudkan Ketentraman dan Keteribatan Umum</i>		<i>kasus ketentraman dan keteribatan umum di wilayah kecamatan</i>	N/A	N/A	35	32	29	26	23
		Sasaran 1. Menurunnya kasus ketentraman dan keteribatan umum di tingkat kecamatan	Persentase penanganan kasus ketentraman dan keteribatan umum oleh pihak secara bersinergi	N/A	N/A	40%	45%	50%	55%	60%
3.	<i>Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas Layanan Kecamatan</i>		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	80.75	N/A	81.00	81.25	81.50	81.75	82.00
		Sasaran 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan yang memiliki standar pelayanan dan standar operasional prosedur	N/A	N/A	50%	60%	75%	90%	100%
		Sasaran 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Anggaran kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	N/A	N/A	20%	21%	21%	21%	21%
		Sasaran 3. Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelurahan	<i>Indeks kepuasan pemerintahan desa dan kelurahan terhadap pembinaan oleh pihak kecamatan</i>	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemerintahan Desa dan kelurahan teribat administrasi	N/A	N/A	80%	90%	100%	100%	100%

OPD Kecamatan Kelapa dalam hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diarahkan pada upaya pembangunan sumber daya manusia yang didukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

### **3.3. Program Pendukung Prioritas Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat**

Pencapaian prioritas nasional, provinsi maupun kabupaten sangat ditentukan oleh dukungan prioritas Perangkat Daerah yang dituangkan melalui program pembangunan daerah yang dilaksanakan. Dalam perubahan RKPD OPD Kecamatan Kelapa Tahun 2024, dukungan program terhadap prioritas nasional maupun provinsi ditampilkan pada Tabel 3.3, 3.4 dan Tabel 3.5.

**Tabel 3.3. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024**

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2.45	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	Seluruh Kecamatan
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	
Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	Seluruh Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan

**Tabel 3.4. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 Mendukung Prioritas Nasional**

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2.45	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	Seluruh Kecamatan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	Kecamatan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	Seluruh Perangkat Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

**Tabel 3.5. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 Mendukung Prioritas Provinsi**

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2.45	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	Seluruh Kecamatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	Kecamatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	Seluruh Perangkat Daerah	Peningkatan partisipasi publik dan Tatakelola Pemerintahan
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan	Peningkatan partisipasi publik dan Tatakelola Pemerintahan
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan	Peningkatan partisipasi publik dan Tatakelola Pemerintahan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 merupakan gambaran rencana pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Pagu indikatif dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan pertimbangan utama dengan memanfaatkan dana dengan sebaik-baiknya serta difokuskan pada pencapaian prioritas pembangunan daerah

Pencapaian prioritas pembangunan daerah tentunya didapat melalui program-program prioritas yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan diharapkan memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Tentu saja rencana pembangunan yang telah disusun tidak akan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, mengingat keterbatasan potensi anggaran. Namun demikian, melalui program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan secara langsung dapat menyelesaikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan

Pelaksanaan perumusan program/kegiatan/subkegiatan diklasifikasikan atas program penunjang urusan pemerintahan daerah, urusan wajib, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur pemerintahan umum serta unsur kewilayahan

OPD Kecamatan Kelapa dalam hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan program/kegiatan dan subkegiatan berdasarkan :

#### **4.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, yang merupakan program untuk pelaksanaan kegiatan rutin pada setiap perangkat daerah. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan rutin perangkat daerah antara lain kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (digunakan bagi perangkat daerah yang memiliki penerimaan daerah) administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah serta peningkatan pelayanan BLUD (digunakan bagi perangkat daerah yang menggunakan sistem BLUD)

#### **4.1.2. Unsur Kewilayahan**

Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh 6 (enam) perangkat daerah yang diantaranya adalah Kecamatan Kelapa. Kecamatan Kelapa melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

## 4.2 Pendanaan Rencana Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas yang ditetapkan sudah memiliki pagu indikatif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024. Rincian pagu indikatif berdasarkan urusan dan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1 Pagu Indikatif Perubahan RKPD Berdasarkan Urusan Tahun 2024**

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN	
			RKPD INDUK	RKPD PERUBAHAN
1	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Kelapa	5,667,610,000	5,592,560,000

**Tabel 4.2 Pagu Indikatif Perubahan RKPD Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN	
		RKPD INDUK	RKPD PERUBAHAN
1	Kecamatan Kelapa	5,667,610,000	5,592,560,000

Perubahan RKPD dan Pendanaan Perangkat Daerah OPD Kecamatan Kelapa Tahun Anggaran 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel TC.33 dibawah ini :

Tabel T-C. 33

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Perakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kelapa

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01			KECAMATAN KELAPA			5,592,560,000.00				6,069,000,000.00
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100%	4,102,960,000.00			100%	4,732,420,000.00
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,500,000.00			100%	32,760,000.00
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kecamatan Kelapa	4 dokumen	300,000.00	APBD	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Kelapa	1 dokumen	300,000.00	APBD	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Kelapa	1 dokumen	300,000.00	APBD	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kelapa	4 laporan	300,000.00	APBD	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kelapa	3 laporan	300,000.00	APBD	

<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>3,145,450,000.00</b>			<b>100%</b>	<b>3,862,500,000.00</b>
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kelapa	26 orang/bulan	3,144,550,000.00	APBD		26 orang/bulan	3,850,000,000.00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Kelapa	1 laporan	300,000.00	APBD		1 laporan	2,500,000.00
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Kelapa	2 laporan	300,000.00	APBD		2 laporan	5,000,000.00
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Kelapa	2 dokumen	300,000.00	APBD		2 dokumen	5,000,000.00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>300,000.00</b>			<b>100%</b>	<b>6,000,000.00</b>
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Kelapa	3 laporan	300,000.00	APBD		3 laporan	6,000,000.00

7	01	01	2.04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		100%	300,000.00			100%	2,500,000.00
7	01	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Kecamatan Kelapa	1 dokumen	300,000.00	APBD		1 dokumen	2,500,000.00
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah</b>		100%	900,000.00			100%	5,000,000.00
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Kelapa	1 dokumen	300,000.00	APBD		1 dokumen	3,000,000.00
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Kelapa	26 orang	300,000.00	APBD		26 orang	1,000,000.00
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Kecamatan Kelapa	26 orang	300,000.00	APBD		26 orang	1,000,000.00
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100%	286,550,000.00			100%	196,580,000.00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kelapa	1 paket	2,000,000.00	APBD		1 paket	3,000,000.00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kelapa	2 paket	20,000,000.00	APBD			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Kelapa	1 paket	5,500,000.00	APBD		1 paket	1,000,000.00

7	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kelapa	1 paket	70,000,000.00	APBD		1 paket	100,000,000.00
7	01	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Kelapa	1 paket	21,500,000.00	APBD		1 paket	10,000,000.00
7	01	01	2.06	06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Kelapa	1 dokumen	2,250,000.00	APBD		1 dokumen	1,700,000.00
7	01	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kelapa	1 paket	55,000,000.00	APBD		1 paket	15,880,000.00
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kelapa	1 laporan	110,000,000.00	APBD		1 laporan	60,000,000.00
7	01	01	2.06	10		Pentatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pentatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Kelapa	1 dokumen	300,000.00	APBD		1 dokumen	5,000,000.00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>624,480,000.00</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>611,080,000.00</b>
7	01	01	2.08	01		Penyediaan jasa surat-menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kelapa	0 laporan	-	APBD		1 laporan	2,000,000.00
7	01	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kelapa	1 laporan	45,000,000.00	APBD		1 laporan	30,000,000.00
7	01	01	2.08	03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kelapa	1 laporan	5,000,000.00	APBD		1 laporan	7,000,000.00
7	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kelapa	1 laporan	574,480,000.00	APBD		1 laporan	572,080,000.00

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	43,480,000.00			12 Bulan	16,000,000.00
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kelapa	13 Unit	5,600,000.00	APBD		13 Unit	6,000,000.00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kelapa	2 Unit	28,000,000.00	APBD		2 Unit	3,000,000.00
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kelapa	8 Unit	4,880,000.00	APBD		8 Unit	5,000,000.00
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kelapa	1 Unit	5,000,000.00	APBD		1 Unit	2,000,000.00
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan		100%	479,315,000.00			100%	160,000,000.00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 orang	8,075,000.00			100 orang	10,000,000.00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kelapa	1 laporan	8,075,000.00	APBD		1 laporan	10,000,000.00

7	01	02	2.03		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		1 urusan	467,940,000.00			1 urusan	140,000,000.00
7	01	02	2.03	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kelapa	1 laporan	467,940,000	APBD		1 laporan	140,000,000.00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		8 urusan	3,300,000.00			8 urusan	10,000,000.00
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Kelapa	1 laporan	300,000.00	APBD		1 laporan	5,000,000.00
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang di Limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Kelapa	1 laporan	3,000,000.00	APBD		1 laporan	5,000,000.00
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat		100%	18,935,000.00			100%	33,000,000.00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 orang	16,825,000.00			100 orang	30,000,000.00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kelapa	1 laporan	16,825,000.00	APBD		1 laporan	30,000,000.00

7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		100%	2,110,000.00			100%	3,000,000.00
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Kelapa	1 laporan	2,110,000.00	APBD		1 laporan	3,000,000.00
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	2,825,000.00			100%	16,500,000.00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		110 Orang	2,825,000.00			110 Orang	16,500,000.00
7	01	04	2.01	01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kelapa	1 laporan	300,000.00	APBD		1 laporan	10,000,000.00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kelapa	1 laporan	2,525,000.00	APBD		1 laporan	6,500,000.00
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan		100%	47,000,000.00			100%	80,000,000.00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah		7 urusan	47,000,000.00			7 urusan	80,000,000.00

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan mempedomani Rencana Strategis OPD Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, memperhatikan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dan memperhatikan kebutuhan pembangunan daerah berdasarkan tema pembangunan yang disesuaikan terkait perkembangan/perubahan keadaan dan kondisi yang terjadi pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah.

Perubahan Renja OPD Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan kaedah-kaedah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja disusun untuk mengakomodir kebijakan pemerintah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta belanja yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera;
2. Perubahan Renja disusun sebagai langkah awal dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2024 melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024;
3. Berdasarkan Perubahan RKPD, setiap Perangkat Daerah harus membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang bertujuan mengoptimalkan sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta APBN melalui Dana Alokasi Khusus;

4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program rencana pembangunan guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati Bangka Barat melalui Bappelitbangda Kabupaten Bangka Barat;
5. Pada akhir anggaran Tahun 2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi anggaran dan kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2024;
6. OPD Kecamatan Kelapa menyusun evaluasi hasil rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode selanjutnya.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Tahun 2024, prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan daerah akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta diharapkan dapat mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang telah ditetapkan.

**Kelapa, 26 September 2024**

**Kepala OPD,**



**Hj. RESMAYANA, S.Pd**

**NIP.197004161994122002**